

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN NILAI-NILAI SOSIAL-BUDAYA BANGSA

Tri Pranadji

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor*

PENDAHULUAN

Hingga umurnya yang ke 59 tahun, tampaknya belum ada tanda-tanda Indonesia akan menjadi bangsa besar seperti yang dicita-citakan para *founding fathers*. Untuk bisa keluar dari "jebakan" krisis sosial-ekonomi-politik dalam beberapa tahun mendatang tampaknya masih cukup berat. Kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang hampir tersebar di seluruh pelosok negeri, sepiunya aktualisasi keadilan hukum bagi masyarakat kecil, dan tatanan politik yang sangat bias elit masih menjadi pemandangan telanjang di depan publik. Dengan kekayaan alam yang sulit dicari bandingnya, pernah mendapat bantuan dana ("hutang luar negeri") yang berlimpah, pernah "dibina" salah satu negara adidaya, dan jumlah penduduk yang besar tampaknya belum cukup menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21 dalam arti yang sebenarnya. Tanpa adanya bingkai nilai sosio-budaya atau kelembagaan (modal sosial) yang sehat dan kuat, keinginan menjadikan bangsa ini memiliki keberlanjutan bisa dianggap sebagai impian seorang "paranoia" (Bartelemus, 1999; Grootaert, 1998). Sulit ditolak jika ada pihak manapun yang mengajukan pertanyaan kritis: "Apakah bangsa Indonesia masih berhak mempunyai cita-cita menjadi bangsa besar di abad 21 ini?"

Dalam perjalanannya ke depan (abad 21), sebagai bangsa besar, Indonesia seperti sebuah "kapal induk" yang sedang oleng di tengah badai. Perjalanan hidup bangsa Indonesia bukan saja seperti kapal induk tanpa peta navigasi, melainkan juga seperti kapal induk yang kehilangan energi untuk menggerakkan seluruh sistem navigasinya. Dikaitkan dengan cita-cita awal pendirian negara, seharusnya bangsa Indonesia memiliki daya imortalitas yang tinggi. Dari awal yang dibangun *founding fathers* adalah semangat atau jiwa bangsa, bukan bangunan material. *Immortalitas* (suatu bangsa) bertolak dari *soul* (Sahakian, 1968). Gejala yang mengarah pada "kematian" bangsa Indonesia akhir-akhir ini bisa diidentikkan dengan semakin memudarnya atau tereliminasinya roh, jiwa atau semangat bangsa sebagaimana dimaksudkan Socrates. Upaya penemuan kembali nilai-nilai bangsa Indonesia (*re-discovery of the Indonesian soul*) yang telah memudar atau nyaris hilang bukan saja bisa dipandang sebagai upaya menghindarkan bangsa Indonesia tereliminasi dari pergaulan masyarakat dunia, melainkan juga untuk memberi pencerahan ke depan agar Indonesia bisa menjadi bangsa besar di awal abad 21.

Dari Seminar Nasional “Pembangunan Yang Berbasis Nilai-nilai Sosial-Budaya Bangsa” yang diselenggarakan Depdagri bekerjasama dengan ISI Pusat (30 Juni 2004) dihasilkan satu rekomendasi penting, yaitu pembangunan bangsa ke depan perlu dikaitkan langsung dengan pengembangan nilai-nilai sosial-budaya dasar yang bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21. Pengembangan nilai sosial-budaya bangsa (NSB), sebagai modal sosial dan budaya (Kliksberg, 1999), pada akhirnya harus bisa diimplementasikan dalam skala lokal maupun nasional, sehingga bangsa Indonesia bukan saja mampu keluar dari krisis multi-dimensi melainkan juga (yang lebih penting) bisa berdiri tegak di tengah-tengah persaingan global yang semakin keras tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa yang terhormat dan beradab.

Upaya menemukan kembali nilai-nilai untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia ke depan saat ini mendesak dilakukan. Diharapkan aktualisasi penemu-an kembali nilai-nilai untuk membangun kehidupan bangsa ini bisa dijadikan semacam *plat form* atau bagian dari visi utama rencana strategis Depdagri di masa datang. Sejalan dengan itu, dalam waktu dekat diharapkan dapat dibuat panduan langkah-langkah kongkrit untuk pengembangan konsep “Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai” yang bisa dioperasionalkan oleh kabinet baru hasil Pilpres 2004. Pengembangan konsep ini bisa dipandang sebagai upaya melakukan terobosan pendekatan atau semacam ”revolusi paradigma” (Kuhn, 1967) pembangunan bangsa, yang semula mengandalkan pendekatan material atau pertumbuhan ekonomi bersyarat stabilitas politik, menjadi yang mengandalkan nilai-nilai sosial-budaya dan energi otonomi daerah. Sudah barang tentu, konsep yang dimaksud seyogyanya harus sudah terwujud sebelum kabinet baru terbentuk pada tahun 2005-2009.

Dalam rangka pengembangan konsep yang dimaksud dalam tulisan ini dikemukakan langkah-langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu: *pertama*, perlunya melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai ideal dari khasanah agama-agama (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan kepercayaan lain) yang hidup di Indonesia. *Kedua*, perlu ada gagasan awal tentang rumusan nilai-nilai yang dianggap mampu merepresentasikan persyaratan agar suatu bangsa dapat mencapai kemajuan secara meyakinkan dalam waktu relatif cepat. *Ketiga*, pemetaan kesenjangan antara nilai-nilai ideal dan penerapan atau aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan ini perlu dipetakan penyebab terjadinya kesenjangan dilihat dari aspek kontradiksi antar nilai, ekonomi, (moralitas) sosial-budaya, politik dan keamanan. *Keempat*, agar strategi pengembangan NSB efektif perlu ditelaah faktor pendukung apa saja yang dibutuhkan. Rumusan strategi pengembangan NSB diharapkan bisa dibuat secara spesifik menurut daerah atau kecamatan. Dengan begitu harapan untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dalam pergaulan dunia di awal abad 21 menjadi lebih terbuka, dan sekaligus mendapat dukungan kuat dari masyarakat bawah.

KE ARAH PENCARIAN NILAI-NILAI DASAR BANGSA

Dalam kaitannya dengan pencarian nilai-nilai dasar bangsa Indonesia ke depan, ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dicari jawabannya: “Mengapa dahulu bangsa Indonesia mempunyai kehormatan tinggi dan sangat disegani dalam pergaulan masyarakat dunia ?” Pertanyaan sekarang ini: “Mengapa bangsa Indonesia kini terpuruk dan pandangan masyarakat dunia terhadap bangsa Indonesia sangat buruk, nyaris dinilai sebagai bangsa yang tidak beradab ?”. Dari dalam sendiri tampak gejala runtuhnya ”kepercayaan diri” secara kolektif sebagai bangsa. Pertanyaan dalam rangka pembangunan bangsa ke depan: “Nilai-nilai sosial-budaya seperti apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terhormat ?” Ketiga pertanyaan di atas harus dilihat dalam rangkaian perubahan pendekatan penerapan nilai-nilai sosial-budaya bangsa.

Jawaban pertanyaan pertama adalah bahwa pada awal kemerdekaan prioritas pembangunan ditekankan pada pengembangan karakter bangsa atau *national character building* (NCB). Dengan menekankan pada NCB, selama sekitar dua dekade setelah merdeka, bangsa Indonesia dikenal memiliki nilai-nilai dan semangat kebangsaan yang bisa dijadikan acuan untuk menjadi bangsa besar, walaupun saat itu kemajuan di bidang material dan ekonomi tergolong sangat rendah. Nilai yang mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia adalah terpompanya harga diri bangsa, sehingga sebagai bangsa yang baru saja lepas dari penjajahan sudah bisa berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang sudah lama merdeka. Harga diri ini kemudian diikuti dengan upaya menegakkan kemandirian yang tinggi, atau paling tidak menjauhkan diri dari mental “pengemis” bantuan dari negara luar. Seluruh aktivitas pembangunan sejauh mungkin dijalankan berdasar kemampuan sendiri, misalnya dengan menegakkan semangat berdikari dalam membangun sistem produksi dalam negeri, mirip prinsip swadesi yang dilakukan di India.

Penggunaan slogan atau pernyataan utopia (Manheim, 1991) dalam rangka mengefektifkan implementasi suatu program (politik) secara massal sangat diperlukan. Slogan berdikari ini misalnya, bukan saja bisa dijadikan pedoman kerja pemerintah, melainkan juga bisa dijadikan bagian dari semangat seluruh komponen bangsa dalam menyelenggarakan sistem kenegaraannya. Saat itu seakan-akan telah terbangun nilai empati yang tinggi antar sesama anak bangsa dalam penyelenggaraan negara. Dengan nilai itu bukan saja bisa ditegakkan semangat tidak ingin terikat dengan bantuan asing, namun juga disadari tentang pentingnya membangun semangat gotong-royong (“persatuan”) dari segenap elemen bangsa sebagai modal sosial utama membangun negara bangsa.

Jawaban pertanyaan kedua adalah bahwa sebelum proses NCB selesai, bangsa Indonesia terlalu cepat atau terjebak masuk dalam pembangunan berbasis

material atau pemacuan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan bantuan atau utang luar negeri yang sangat mengikat. Semangat menegakkan kemandirian politik dan ekonomi, yang dijadikan program utama pemerintah 1945-1965, secara tiba-tiba ("revolusioner?") diganti dengan program pemacuan pertumbuhan ekonomi yang mengandung semangat "mengemis" pada bantuan asing. Sepertinya elit politik dan penyelenggara negara sudah sangat tidak sabar untuk menikmati hasil kemerdekaan, dan memonopoli banyak hal untuk segera mewujudkan keinginan pribadi atau kelompoknya. Penerapan pendekatan stabilitas dan keamanan secara berlebihan oleh pemerintah, yang dianggap sebagai syarat utama pertumbuhan ekonomi, telah menimbulkan efek kontra produktif terhadap pengembangan NSB dan NCB. Lembaga komunal yang hidup dari nilai-nilai lokal tingkat desa dan dukuh banyak yang mati karena pendekatan stabilitas dan sistem pemerintahan yang monolitik (Tjondronegoro, 1977; Pranadji, 2003).

Sentralisme kekuatan politik yang kurang dilandaskan pada pemahaman tentang pentingnya pengembangan NSB menjadikan nilai budaya konsumtif atau materialisme dan korupsi berkembang tidak terkendali. Dengan kata lain budaya materialisme ini bukan saja menjadi nilai-nilai aktual yang banyak dijalankan elit politik dan pemerintah secara hampir telanjang, namun nilai aktual ini juga sangat mendistorsi gerakan pengembangan NSB dan NCB. Konflik antar elemen bangsa yang menjurus pada gejala disintegrasi adalah akibat terhambatnya proses NCB dan berkembangnya *mutual social distrust* yang berawal dari penyimpangan elit politik dan pejabat pemerintah yang tidak mendapat penanganan secara lugas. Pelaksanaan hukum, sebagai benteng formal untuk mengatasi korupsi, dipaksa tunduk pada kemauan "pribadi" pucuk pimpinan negara (Muhaimin, 1980).

Jawaban pertanyaan ketiga adalah bahwa paling tidak ada 4 (empat) kelompok nilai (komposit) yang bisa mengarahkan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21, yaitu: *pertama*, kelompok nilai yang bisa dijadikan pembangkit semangat kolektif bangsa untuk mandiri di bidang produksi barang-barang kebutuhan dasar manusia. Mengatasi kemiskinan dan kelaparan tercakup dalam kelompok nilai ini. *Kedua*, kelompok nilai yang bisa mengarahkan dan menjadikan bangsa Indonesia secara kolektif memiliki daya saing tinggi di bidang ekonomi, politik dan keamanan. Daya saing bangsa seyogyanya bisa dibangkitkan melalui kelompok nilai ini. *Ketiga*, kelompok nilai yang bisa membangkitkan solidaritas atau kesatuan bangsa secara lintas etnis/agama/golongan dan generasi. Demokrasi berbasis pluralisme seyogyanya bisa dibangkitkan melalui kelompok ini. *Keempat*, kelompok nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap kemanusiaan dan hak hidup generasi mendatang. Dalam kaitan ini, kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya simbol "kemenangan" masyarakat Indonesia, melainkan sekaligus sebagai kemenangan peradaban masa datang yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia.

NILAI-NILAI SOSIAL-BUDAYA BANGSA

Dalam sejarah kemajuan Eropa Barat, Max Weber (*“Protestant Ethics and Spirit of Capitalism”*) telah memperkenalkan kerja keras sebagai “ibadah” dan sekaligus faktor penjelas mengapa suatu masyarakat atau bangsa bisa lebih maju dibanding masyarakat atau bangsa lain. Jika indikator kemajuan tidak semata-mata kemajuan budaya material, misalnya besarnya nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), melainkan mencakup juga (misalnya) aspek penghormatan terhadap masyarakat lain, terciptanya keadilan, kesatuan (“solidaritas”) bangsa, dan pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang; maka mengandalkan nilai kerja keras saja untuk kemajuan masyarakat tidak lagi dinilai memadai. Penerapan nilai lain, misalnya rasa malu yang tinggi, seperti yang dianut dalam kehidupan masyarakat Jepang, tidak kalah pentingnya dibanding penerapan nilai kerja keras.

Kemajuan suatu bangsa juga bisa dijelaskan dari apakah nilai (seperti) rajin, menghargai prestasi, menjunjung tinggi penggunaan cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan persoalan, menempatkan visi ke depan sebagai pedoman bersama dalam bertindak, dan menjunjung tinggi sifat amanah (*high trust*) atau kejujuran telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari bangsa tersebut. Secara sosiologis besarnya investasi (termasuk modal asing) bukan penyebab utama kemajuan bangsa; melainkan lebih cocok ditempatkan sebagai indikator atau salah satu instrumen untuk memprediksi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Kemunduran ekonomi bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir bukan disebabkan tidak adanya investasi masuk dari luar, melainkan lebih disebabkan karena tidak efisiennya pengelolaan investasi tersebut. Budaya korupsi yang meluas merupakan indikator betapa sangat tidak efisiennya keorganisasian negara dalam mengelola investasi, termasuk investasi yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sejumlah nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa tersebut, setidaknya ada 12 (dua belas) nilai sosial-budaya atau NSB (Tabel 1). Masing-masing dari 12 NSB bisa dihubungkan dengan 4 (empat) komponen atau kumpulan NSB yang membentuk bingkai (nilai) kemajuan bangsa. Hubungan antara NSB dan bingkai kemajuan bangsa dapat dilihat pada Tabel 2. Tampak bahwa NSB yang membangkitkan rasa malu dan harga diri, kerja keras, rajin dan hidup hemat merupakan sekumpulan NSB (atau nilai komposit) yang berperan dalam kemajuan bangsa. NSB lain yang juga penting ditegakkan adalah yang berkaitan dengan penerapan berpikir sistematis, rasional, serta sabar dan syukur. Nilai amanah bisa dipandang sebagai kombinasi antara nilai rasa malu dan harga diri, berpikir sistematis, empati tinggi dan visi jangka panjang.

Penerapan nilai-nilai kemajuan harus memiliki konsistensi sejak tingkat individu atau keluarga, komunitas kecil hingga kolektivitas bangsa. Jika penerapan nilai atau sejumlah nilai tidak konsisten mengikuti tingkatan pelaku sosial, maka

akan terjadi sejumlah distorsi terhadap kemajuan bangsa. Bisa terjadi pada tingkat individu atau keluarga nilai kerja keras berhasil diterapkan, namun penerapan nilai empati atau rasa malu dikesampingkan. Secara individu atau keluarga seseorang bisa maju, namun keberadaan seorang individu atau keluarga tersebut pada akhirnya justru membahayakan keberadaan komunitas kecilnya atau bahkan bangsanya. Ini sebagai salah satu atau bagian dari penerapan nilai "kebinatangan ekonomi" yang a-sosial. Sebagai contoh, seorang koruptor bisa jadi adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai kerja keras, namun tidak menjunjung tinggi rasa malu, amanah dan empati. Keberadaan seseorang seperti ini dalam sistem masyarakat besar atau bangsa cenderung membahayakan.

Tabel 1. Perbandingan Nilai-nilai yang Mencerminkan Kemajuan dan Keterbelakangan suatu Individu, Komunitas Kecil dan Bangsa

Nilai-nilai dasar kemajuan	Nilai-nilai dasar terbelakang
1. Rasa malu & harga diri	<i>Rai gedheg</i> & rendah diri
2. Kerja keras	Kerja lembek
3. Rajin & disiplin	Malas & seenaknya
4. Hidup hemat & produktif	Boros & konsumtif
5. Gandrung inovasi	Resisten inovasi
6. Menghargai prestasi	Askriptif/primordial
7. Sistematis & terorganisir	Acak & difuse
8. Empati tinggi	Antipati tinggi
9. Rasional/impersonal	Emosional/personal
10. Sabar dan syukur	Pemarah dan penuntut
11. Amanah (<i>high trust</i>)	Tidak bisa dipercaya
12. Visi jangka panjang	Visi jangka pendek

Mengikuti pendapat Blau (1967), kemungkinan terjadinya NSB di tingkat masyarakat bangsa mendistorsi perkembangan NSB di tingkat individu atau keluarga sangat terbuka. Legitimasi nilai yang secara sepihak dipaksakan dari atas akan membuat ruang gerak dan kreativitas individu tidak bisa berkembang wajar. Bagaimanapun juga NSB di tingkat masyarakat bangsa tetap perlu dibangun, paling tidak (misalnya) untuk mengatasi berkembangnya nilai-nilai permisif di tingkat individu yang tanpa kendali. Maraknya kritik berbagai kalangan terhadap pembuatan dan peredaran film "Buruan Cium Gue" akhir-akhir ini bisa dipandang sebagai bagian dari proses pengembangan NSB yang tidak datang dari pemerintah. Menghidupkan nilai-nilai yang mengarah pada penolakan kehidupan maksiat, peredaran minuman keras dan penggunaan obat-obatan terlarang bisa dipandang sebagai proses pengembangan pengembangan NSB yang muncul dari masyarakat. Terbukanya iklim kebebasan sedikit banyak bisa menjadi "jembatan" atau mekanisme alamiah pengembangan NSB.

Saling mendistorsi antar NSB juga bisa terjadi pada komunitas kecil yang tidak konsisten dengan masyarakat bangsa. Sebagai gambaran, suatu komunitas kecil bisa jadi telah mengawali atau telah mencerminkan penerapan nilai kemajuan yang tinggi, karena tertanam dan dijalankannya nilai kerja keras dalam kehidupannya sehari-hari. Namun tanpa tertanamnya rasa malu, empati tinggi, memikirkan (akibat) jangka panjang dan amanah dalam hubungannya dengan komunitas lain; maka keberadaan komunitas kecil tersebut dalam sistem masyarakat setingkat bangsa akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa tersebut. Pendeknya, masyarakat bangsa Indonesia akan maju jika menerapkan secara konsisten sebagian besar atau seluruh NSB pada seluruh tingkat pelaku sosialnya. Penerapan NSB secara sepotong-sepotong bukan saja tidak akan efektif, namun juga secara mutualistik bisa menimbulkan efek kontra produktif (Lubbers, 1999).

Dalam kaitan dengan fungsinya terhadap kemajuan bangsa, masing-masing NSB tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, nilai yang menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri memiliki hubungan erat dengan nilai kerja keras, rajin, empati tinggi, amanah (*high trust*) dan visi jangka panjang. Gabungan beberapa NSB sekaligus akan bisa membentuk nilai komposit bangsa (Tabel 2 dan 3), dalam hal ini disederhanakan sebagai produktivitas, keadilan dan kehormatan, solidaritas dan keberlanjutan bangsa. Nilai komposit yang mengandung pentingnya menempatkan visi jangka panjang sebagai pedoman hidup bangsa akan bisa menggiring ditegakkannya nilai sabar dan syukur, amanah, berpikir sistematis, empati tinggi, menghargai prestasi, kerja keras dll. Masing-masing nilai komposit mempunyai fungsi khas untuk membangun keberlanjutan bangsa. Kekuatan nilai komposit atau interaksi “sinergis” antar nilai-nilai dasar atau NSB dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Perbandingan Nilai-nilai Komposit yang Mencerminkan Kemajuan dan Keterbelakangan suatu Individu, Komunitas Kecil dan Bangsa

Nilai komposit kemajuan	Nilai komposit keterbelakangan
1. Produktif dan humanistik	Eksploitatif dan intimidatif
2. Keadilan dan berbudi pekerti tinggi	Imperialistik dan berbudi pekerti rendah
3. Menjunjung tinggi solidaritas	Bercerai-berai dan saling menyalahkan
4. Mengutamakan keberlanjutan dan ketegaran diri yang tinggi	Mendahulukan hasil segera dan kerapuhan diri yang tinggi

Hubungan antar nilai kemajuan yang satu dengan yang lain juga sangat penting untuk diperhatikan. Nilai kerja keras, misalnya, harus dikaitkan dengan rasa malu dan harga diri, serta empati yang tinggi. Penerapan NSB secara parsial bisa bertentangan dengan upaya memajukan bangsa. Tanpa semangat *collective willingness* yang didasarkan pada kematangan emosi dan kecerdasan kolektif

penerapan satu NSB bisa mendistorsi kemajuan bangsa. Sebagai contoh, penerapan nilai kerja keras tingkat individu atau komunitas kecil yang tidak diimbangi dengan nilai empati tinggi, rasa malu dan amanah, maka hal itu akan bisa membentuk nilai “binatang ekonomi”. Hal lain yang juga perlu diperhatikan, misalnya, tanpa penanaman rasa malu yang tinggi secara kolektif mustahil nilai rasional dan impersonal bisa menjadi bagian utama yang melandasi terbentuknya kekuatan solidaritas atau persatuan bangsa. Selain masing-masing NSB tidak bisa berdiri sendiri, antar NSB secara bersama-sama membentuk nilai komposit kemajuan bangsa.

Tabel 3. Hubungan antara Nilai-Nilai Dasar dan Komponen (Nilai Komposit) Kemajuan Bangsa Menurut Tingkat Kekuatannya

Nilai-nilai dasar	Komponen kemajuan bangsa			
	Produktivitas	Keadilan dan kehormatan	Solidaritas	Keberlanjutan
Rasa malu & harga diri	+++	+++	+++	+++
Kerja keras	+++	+++	+++	+++
Rajin & disiplin	+++	+++	+++	+++
Hidup hemat	+++	+++	+++	+++
Gandrung inovasi	+++	++	++	+++
Menghargai prestasi	+++	++	+	++
Berpikir sistematis	+++	++	+++	+++
Empati tinggi	++	++	+++	+++
Rasional/impersonal	+++	+++	++	+++
Sabar dan syukur	++	+++	+++	+++
Amanah (<i>high trust</i>)	+	++	+++	+++
Visi jangka panjang	+	++	+++	+++

Keterangan: (1) +++ = keterkaitan sangat kuat

++ = keterkaitan sedang

+ = keterkaitan kecil

(2) Pemuatan tanda (+) dalam tabel bersifat hipotetik dan masih perlu dikaji secara lebih kritis dan diuji secara empirik.

Tabel 2 menggambarkan tentang empat nilai komposit yang dibutuhkan suatu bangsa untuk maju. Keempat nilai komposit tersebut adalah nilai produktif dan humanistik, keadilan dan budi pekerti atau akhlak tinggi, menjunjung tinggi solidaritas (atau persatuan), dan keberlanjutan berdasar ketegaran diri yang tinggi. Satu nilai komposit kemajuan bangsa dibentuk oleh beberapa nilai dasar (NSB) sekaligus. Sebagai contoh, nilai keberlanjutan dan ketegaran diri yang tinggi dibentuk oleh 12 NSB. Dengan nilai komposit ini kemajuan bangsa Indonesia bukan saja akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan juga merupakan berkah bagi bangsa-bangsa lain yang belum maju.

Suatu bangsa akan memiliki energi kemajuan tinggi jika mampu memiliki beberapa nilai komposit sekaligus, (nilai komposit merupakan kombinasi atau

senyawa antar beberapa NSB yang fungsinya menggerakkan dan mengarahkan bangsa pada peradaban yang lebih maju secara universal). Dari Tabel 2 tampak bahwa kemajuan bangsa perlu dipandu sejumlah nilai komposit dari tingkat individu/keluarga, komunitas kecil hingga tingkat masyarakat bangsa. Konsistensi penerapan nilai komposit dari individu hingga bangsa merupakan suatu keharusan. Jika tidak demikian maka antar tingkat pelaku sosial akan bisa saling mendistorsi. Mengingat tingginya pluralitas etnis dan budaya lokal, seandainya Indonesia mampu menerapkan nilai komposit tersebut secara konsisten maka bangsa Indonesia bisa dianggap mampu menerapkan nilai-nilai kemajuan peradaban bangsa secara universal sebagaimana dicita-citakan para *founding fathers*. Selain itu, nilai komposit ini bisa dijadikan orientasi nilai pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

ANTARA NILAI-NILAI IDEAL DAN AKTUAL

Keterpurukan bangsa ini bukan disebabkan tidak adanya nilai-nilai kemajuan yang dikenal, melainkan tidak teraktualisasikannya nilai-nilai kemajuan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Kesenjangan antara nilai ideal dan aktual yang tidak diatasi secara serius merupakan penyebab utama tidak majunya bangsa Indonesia. Semakin besar kesenjangan antara nilai ideal dan aktual menunjukkan semakin tingginya keterpurukan bangsa. Penelaahan terhadap kesenjangan nilai ini dirasa penting, bukan saja ditujukan pada seberapa besar kesenjangan yang terjadi, melainkan juga pada apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut. Secara lebih rinci peta keterpurukan atau kesenjangan ini bisa dibuat hingga tingkat kabupaten dan kota. Melalui pembuatan peta kesenjangan tersebut akan memudahkan dirumuskan alternatif kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempersempit jurang kesenjangan.

NSB secara jernih sebaiknya digali dari khasanah agama. Hampir bisa dikatakan bahwa setiap agama mengenal nilai-nilai kemajuan bangsa. Masih bisa dimengerti seandainya ditemui satu agama mempunyai penekanan yang khusus terhadap sejumlah nilai tertentu, sedangkan agama yang lain mempunyai penekanan khusus terhadap sejumlah nilai yang lain. Namun yang akan sulit dimengerti adalah jika ditemukan bahwa satu agama menolak nilai-nilai kemajuan yang mendapat penonjolan dari agama lain, walaupun hanya berlaku terhadap satu atau dua nilai. Masalah yang justru lebih penting untuk dicermati adalah “mengapa nilai-nilai yang ada dalam agama hanya dipandang sebagai utopia dan banyak yang tidak terinternalisasi secara budaya pada kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara?”

Kesenjangan antara nilai ideal yang ada dalam khasanah agama dengan kenyataan yang dijalankan sehari-hari di masyarakat masih sangat lebar. Mencari penyebab spesifik mengapa nilai-nilai kemajuan tidak diadopsi secara budaya, baik di tingkat individu, komunitas kecil maupun bangsa, merupakan hal penting.

Diharapkan informasi tentang tingkat kesenjangan nilai dan penyebab terjadinya kesenjangan bisa digali secara kritis di setiap masyarakat pemeluk agama tertentu dan sebarannya menurut wilayah peradaban (misalnya perlu dibedakan antara pemeluk Kristen/Katolik di kota dan pedesaan), wilayah administratif (misalnya antara NU Pasuruan dan NU Lombok Timur), kekhasan etnis atau sub-etnis (misalnya antara kalangan Islam Sumatera Barat dan Islam Jawa Tengah), dan juga menurut atribut sekte (misalnya antara masyarakat NU dan Muhammadiyah, baik di pedesaan maupun perkotaan).

Untuk perumusan kebijakan pengembangan NSB diperlukan peta kesenjangan antara nilai-nilai ideal dengan nilai kenyataan (aktual) yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai wilayah. Dalam peta tersebut sebaiknya telah memuat rincian nilai ideal apa saja yang dikenal suatu masyarakat, dan nilai aktual apa saja yang berkembang. Penyebab terjadinya kesenjangan antara nilai ideal dan aktual perlu dirinci dengan jelas. Beberapa komponen penting penyebab terjadinya kesenjangan adalah: kontradiksi dengan nilai lain (sebutkan jenis nilainya), hambatan ekonomi, sosial-budaya, politik, dan keamanan (Tabel 3). Dalam peta tersebut memuat juga rincian tentang kelompok agama, dikombinasikan dengan budaya, wilayah peradaban (perkotaan-industri atau pedesaan-agraris), dan wilayah otonomi administrasi pemerintahan.

Secara historis, peran pemerintah dalam menghela pembangunan telah diterima sebagai kenyataan. Dalam mengimplementasikan NSB untuk kemajuan bangsa diperlukan intervensi pemerintah yang terarah dan komprehensif. Pedoman untuk intervensi dapat dibuat berdasar peta kesenjangan antara nilai ideal dan aktual di setiap daerah. Pembuatan peta harus melalui dialog kritis antar pakar lintas agama, lintas etnik atau budaya dan didasarkan pada kajian ilmiah lintas keilmuan sosial. Dengan kata lain, peta yang dimaksud dapat dijadikan pedoman untuk merumuskan intervensi apa yang perlu dilakukan (misalnya) pada kabupaten tertentu agar sejumlah NSB untuk kemajuan bangsa bisa diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Peta kesenjangan merupakan dokumen dinamik, yang setiap saat bisa dinilai ulang melalui proses dialog yang produktif antara masyarakat, pemerintah, pelaku ekonomi, tokoh agama dan pakar keilmuan sosial. Dengan cara demikian setiap daerah memiliki kekhasan intervensi, dalam arti bisa diintegrasikan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Intervensi pemerintah sejauh mungkin ditekankan pada upaya menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dengan seluruh elemen *civil society* mengimplementasikan NSB untuk kemajuan bangsa. Pengimplementasian peta kesenjangan ini harus juga menjadi gerakan *civil society* yang kuat. Melalui cara demikian diharapkan dapat ditanamkan secara serentak NSB di setiap daerah secara simultan.

Keragaman dan kearifan nilai etnis Indonesia (Koentjaraningrat, 1983) bisa dipandang modal sosial (Tjondronegoro, 2004) dan budaya untuk membentuk kemajuan bangsa. Dilihat dari kearifan budaya pada berbagai etnis di Indonesia, peluang dapat teratasinya kesenjangan nilai-nilai cukup besar. Energi masyarakat

pada berbagai etnis, baik di Jawa dan luar Jawa, cukup besar untuk mendorong terwujudnya gerakan menutup kesenjangan nilai-nilai. Dari pengamatan langsung di lapangan (Pranadji, 2004), misalnya pada masyarakat Bali dan Dayak pedalaman (Kalimantan Barat), diperoleh gambaran bahwa kedua masyarakat tersebut memiliki kualitas kandungan nilai-nilai sosial-budaya yang tinggi dan bisa diangkat untuk menopang kemajuan bangsa. Pada masyarakat etnis yang memiliki latar belakang pengetahuan agama Semit (Islam, Kristen dan Katolik) seharusnya memiliki energi lebih besar untuk menutup kesenjangan nilai-nilai ke arah kemajuan bangsa.

FAKTOR PENDUKUNG INTERVENSI PEMERINTAH

PNSB menentukan masa depan bangsa Indonesia di abad 21, apakah Indonesia akan tetap menjadi bangsa besar dan tegak berdiri sesuai dengan cita-cita proklamasi 1945, ataukah justru akan menjadi bangsa besar pertama yang akan tereliminasi dalam pergaulan masyarakat dunia? Dalam beberapa dekade terakhir, dalam kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia seperti kehilangan jiwa (*soul*) dan kehilangan semangat untuk menjadi bangsa besar di abad 21. Oleh sebab itu, pengembangan NSB harus dipandang sebagai upaya menemukan “jiwa bangsa yang hilang” atau suatu upaya “*re-discovery of the Indonesian soul*” dalam rangka menatap ke depan (abad 21). Agar cita-cita proklamasi menjadi kenyataan, harus ada semacam gerakan nasional untuk menyegarkan kembali pengembangan NSB sebagai bagian dari NCB.

Intervensi pemerintah hasil Pemilu 2004 harus dipandang sebagai upaya *re-discovery of the Indonesian soul*. Oleh sebab itu, antara pemerintah dan segenap elemen bangsa harus terjalin semacam kesatuan jiwa. Salah satu indikator terjadinya kesatuan jiwa ini adalah bahwa antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa sejauh mungkin tidak terjadi *mutual distrust*. Sehubungan dengan pengembangan NSB, ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan, antara lain:

- (1) Terbentuknya sistem pemerintahan yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan tinggi di mata rakyat. Dalam kaitan ini, terselenggaranya Pilpres dan Pemilu Legislatif 2004 yang jujur, adil dan demokratis merupakan hal yang sangat penting.
- (2) Menempatkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang antara lain dicirikan pentingnya menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, sistem pengambilan keputusan yang demokratis dan *open auditable* secara publik; sebagai bagian penting pembangunan bangsa dan NCB.
- (3) Terwujudnya sistem kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa di mata rakyat. Ciri penting terwujudnya sistem kepemimpinan ini adalah:

terpilihnya pemimpin nasional yang memiliki integritas tinggi (terpercaya, jujur dan adil), adanya kejelasan visi ke depan pemimpin yang jelas dan implementatif, pemimpin yang mampu memberi inspirasi (*inspiring*) dan mengarahkan (*directing*) semangat rakyat secara kolektif, memiliki semangat altruistik, komunikatif terhadap rakyat, mampu membangkitkan semangat solidaristik (*solidarity maker*) atau *conflict resolutor*, dan mengajarkan penggunaan akal sehat dan cara demokratik dalam pengambilan keputusan.

- (4) Terbentuknya sistem kelembagaan legislatif yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Ciri penting yang mencerminkan hal ini adalah terbukanya saluran aspirasi masyarakat lapisan bawah di pedesaan dan perkotaan, sensitivitas yang tinggi lembaga legislatif terhadap gejala ketidak-adilan yang terjadi pada masyarakat bawah dan integritas yang tinggi anggota legislatif di mata publik.
- (5) Adanya kemauan politik (*political will*) ke arah terwujudnya sistem penegakkan hukum (*law enforcement*) yang kuat. Sejalan dengan itu, perlu upaya agar terbentuk *civil society* yang kuat. Dengan ini, pada gilirannya diharapkan bisa menghasilkan tekanan publik yang besar terhadap pentingnya penegakkan hukum.

Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau otonomi daerah tingkat II (kabupaten/kota) bisa dipandang sebagai terbukanya pintu gerbang untuk mengatualisasikan kedaulatan rakyat secara lebih baik. Terbukanya pintu gerbang ini tidak otomatis bisa melancarkan aliran aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan pengontrolan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota secara langsung oleh masyarakat. Otonomi ini juga bisa diartikan sebagai pemberian kesempatan pada elit politik dan pejabat pemerintah kabupaten/kota untuk berbuat semena-mena tanpa bisa dikontrol secara efektif oleh pejabat pemerintah pusat dan masyarakat luas secara normal. Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi daerah di masa datang harus disesuaikan dengan pencapaian tujuan kemakmuran dan kemajuan bangsa di awal abad 21.

Hingga kini pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas hingga penyelenggaraan pemerintahan tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi akan lebih baik jika bisa diturunkan lagi hingga tingkat kecamatan dan desa (Pranadji, 2003). Jika otonomi seperti ini bisa diwujudkan maka jaminan aspirasi masyarakat lapisan bawah tersalur dalam sistem pengambilan keputusan tingkat daerah (dan pusat) menjadi lebih tinggi. Dengan cara demikian, keputusan kolektif tingkat daerah bisa dipandang sebagai representasi dari kedaulatan masyarakat lapisan bawah di tingkat kampung dan dukuh. Dengan adanya saluran kelembagaan aspirasi masyarakat yang efektif hingga tingkat desa, pengembangan NSB bisa mendapat dukungan partisipasi masyarakat bawah yang kuat. Mustahil pengembangan NSB bisa berjalan efektif tanpa dukungan partisipasi masyarakat bawah.

Semangat otonomi sebaiknya juga diterapkan dalam sistem pemilihan kepala daerah, seperti halnya Pilpres dan Pemilihan Kepala Desa. Dengan sistem pemilihan demikian, makna otonomi bukan saja menjadi lebih lengkap, melainkan secara fungsional bisa meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengembangan NSB sedikit banyak berdampak (timbal-balik) positif dengan penerapan semangat otonomi ini. Dalam kaitan ini sistem kepartaian hendaknya mencerminkan bangunan *civil society* yang kuat. Oleh sebab itu, di masa datang sistem kepartaian perlu disinergikan dengan asas keterwakilan masyarakat secara fungsional, tidak hanya secara struktural seperti yang selama ini dijalankan. Hingga kini kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam otonomi daerah masih lebar (Sudarsono, 2003).

KESIMPULAN DAN SARAN

- (1) Saat ini bangsa Indonesia mengalami kegalauan serius. Hal ini bukan saja dalam kaitannya dengan upaya untuk keluar dari krisis, melainkan juga dalam menghadapi persaingan global yang semakin keras dan tidak mengenal ampun. Kebutuhan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa (NSB) dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21 sangat mendesak. Langkah kongkrit pengembangan NSB ini diharapkan bisa diimplementasikan dalam program kerja kabinet hasil Pemilu 2004.
- (2) Pencarian kembali nilai-nilai dasar kemajuan bangsa bisa diawali dengan mengeksplorasi nilai-nilai yang bersumber dari khasanah agama (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan kepercayaan) yang hidup di bumi Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa walaupun secara ekonomi atau pembangunan material relatif tertinggal, kebesaran bangsa Indonesia di mata dunia pada 1-2 dekade setelah merdeka ditentukan oleh kuatnya pengembangan harga diri bangsa dan *national character building* (NCB). Penanaman nilai harga diri bangsa yang tinggi telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa terhormat dan disegani di mata bangsa atau negara lain yang lebih dahulu merdeka dan lebih maju di bidang ekonomi, politik dan keamanan.
- (3) Sebagai langkah awal bisa diajukan 12 NSB yang dianggap berperan besar dalam memajukan bangsa Indonesia di masa datang, yaitu: rasa malu & harga diri, kerja keras, rajin, hidup hemat, menghargai inovasi, menghargai prestasi, berpikir sistematis, empati tinggi, rasional/impersonal, sabar dan syukur, amanah, dan pentingnya visi jangka panjang. Dalam strategi implementasinya, 12 NSB ini perlu dikaitkan dengan 4 (empat) komponen atau indikator kemajuan bangsa, yaitu: produktivitas bangsa yang tinggi, dicapainya keadilan dan kehormatan bangsa, terwujudnya solidaritas atau kesatuan bangsa, serta keberlanjutan bangsa melewati batas generasi dan atribut etnis.

- (4) Dalam 2-3 dekade terakhir terjadi kesejangan yang sangat signifikan antara nilai-nilai ideal dan nilai-nilai yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat individu, komunitas kecil dan masyarakat bangsa. Selain itu, penajaman pada 1 atau 2 NSB (misalnya kerja keras dan rajin) tanpa diimbangi dengan NSB lainnya (misalnya empati dan amanah) bukan saja akan menimbulkan kontradiksi dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga bisa membahayakan kehidupan bangsa secara keseluruhan.
- (5) Upaya memajukan bangsa melalui pengembangan NSB perlu dilakukan melalui pemetaan kesenjangan nilai dan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi. Paling tidak ada 4 faktor penyebab kesenjangan yang dimaksud, yaitu: kontradiksi antar NSB, keadaan ekonomi (individu atau komunitas kecil), sosial-budaya (misalnya marginalisasi dan alienasi masyarakat pedesaan agraris), politik (misalnya sentralisme kekuasaan dan otoritarianisme kepemimpinan nasional atau lokal), dan keamanan. Dengan dapat memetakan kesenjangan nilai-nilai menurut daerah, agama (mencakup sekte-sektenya), kelompok etnis, dan peradaban masyarakatnya (industri-kota; pertanian-desa) diharapkan intervensi yang dilakukan pemerintah menjadi lebih terarah dan efektif.
- (6) Kemajuan bangsa Indonesia ke depan bisa dipandang sebagai penemuan kembali roh kemajuan bangsa (*re-discovery of the Indonesian soul*). Pengembangan NSB bisa dipandang sebagai upaya *re-discovery of the Indonesian soul* di awal abad 21. Sehubungan dengan itu ada beberapa faktor pendukung yang tidak boleh diabaikan, yaitu:
- Terbentuknya sistem pemerintahan yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan tinggi di mata masyarakat (“rakyat”). Diharapkan Pemilu 2004 bisa berjalan di atas rel keadilan, kejujuran dan demokrasi.
 - Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, keputusan yang demokratis dan terbuka terhadap pengawasan publik.
 - Adanya sistem kepemimpinan nasional yang bersih, kuat dan berwibawa di mata rakyat. Hal ini akan terwujud jika pada diri seorang pemimpin dijumpai ciri integritas personal yang tinggi (secara moral dan pengetahuan), visi ke depan yang jelas dan mudah dimengerti oleh publik, altruistik (tidak mementingkan diri sendiri), komunikatif, *solidarity maker*, daya *inspiring* dan *directing* yang tinggi terhadap dinamika masyarakat.
 - Terbentuknya kelembagaan legislatif yang merepresentasikan kedaulatan (aspirasi dan kepentingan) masyarakat banyak, terutama masyarakat kalangan bawah di pedesaan.
- (7) Kebijakan otonomi daerah, yang hanya sampai di tingkat kabupaten/kota, ternyata belum sepenuhnya menjamin kedaulatan masyarakat terakomodasi dalam sistem pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan. Di masa datang kebijakan otonomi ini perlu diturunkan hingga tingkat desa, sehingga lembaga tingkat kampung dan dukuh bisa menjadi saluran aspirasi politik masyarakat bawah. Upaya Pengembangan NSB bukan saja sangat membutuhkan dukungan *civil society* yang kuat, melainkan juga partisipasi masyarakat lapisan bawah yang kuat berbasis sosial-budaya etnis setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartelmus, P. 1999. Sustainable Development: Paradigm or Paranoia? Wupertal Institute fur Klima, Umwet. <http://www.wupperist.org/Publicationen/WP/WP93.pdf>. [23 Agustus 2004].
- Blau, P.M. 1967. Exchange and Power in Social Life. John & Wiley, Inc. New York.
- Drucker, P. 1986. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. William Heinemann Ltd. London.
- Grootaert, C. 1998. Social Capital: The Missing Link? Environmentally and Socially Sustainable Development. The World Bank.
- Khun, T.S. 1967. The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago Press. Chicago.
- Kliksberg, B. 1999. Social Capital and Culture: Master Keys to Development. Cepal Review, 69, December 1999. <http://www.ecalc.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2067/kliksberg.pdf>. [19 Maret 2004].
- Koentjaraningrat. 1983. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Lubbers, R.F.M. 1999. Globalization and Sustainable Development. Globus, January 1999. <http://www.Kubnw16.uvt.nl/web/globus/Lubpdfs/Ecology/Ecolog32.pdf>. [23 Agustus 2004].
- Mannheim, K. 1991. Ideologi and Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Penerbit Kanisius. Jakarta.
- Muhaimin, Y.A. 1990. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. LP3ES. Jakarta.
- Pranadji, T. 2002. Gejala Kesenjangan antara Ideologi dan Pragmatisme Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 20(2):47-59, Desember 2002.
- Pranadji, T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2004. Kerangka Kebijakan Sosio-Budaya: Menuju Pertanian 2025. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 1(22):1-21, Juli 2004.
- Sahakian,, W.S. 1968. History of Philosophy: From The Earliest Times to The Present. Barnes & Noble Books. New York.

- Sudarsono, H. 2003. Otonomi Daerah: Antara Harapan dan Kenyataan. Makalah Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia: “Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Tinjauan Sosiologis”, 5 Agustus 2003. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1977. The Organization Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java. University of Indonesia. Jakarta. (Disertasi).
- Tjondronegoro, S.M.P. 2004. Pembangunan, Modal dan Modal Sosial. Makalah Seminar Sehari “Pembangunan Berbasis Nilai-nilai Sosial Budaya Bangsa”. Departemen Dalam Negeri – Ikatan Sosiologi Indonesia, 30 Juni 2004. Jakarta.